

Efektivitas Pengelolaan Kapal Latih

Buce A Syafaat^{a1}, Hadijah^{b2}, Mochamad Furqon R^{c3}, Egi Sugiawiharja^{d4}, Muchlis Imanullah Arief^{e5}, Aswanti Setiawati^{f6}

^{a,b,c,d,e}Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, Jakarta, Indonesia

^fInstitut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia

kapitanobuc@yahoo.com¹, diahpurwanto@yahoo.co.id², mf.rochyana@gmail.com³, popayz47@gmail.com⁴, muchlisimanullaharief@gmail.com⁵, aswantimurgianto@gmail.com⁶

Abstract. The function of the training ship is as a place for education, training, demonstration and simulation at sea and as a laboratory for educational and teaching activities that develop and improve knowledge, skills, understanding and experience as well as attitudes on board. The aims of the research is to find out whether the management of the training vessel, study case on board KL MH Thamrin, is effective and efficient according to its function, and also to find out whether the management of the training vessel is optimal for human resource development under the Sea Transportation Human Resources Development, as well as to find out the legal and regulatory aspects that support implementation of training activities as a practical learning for cadets. The research's method is qualitative descriptive. The results showed that the level of effectiveness of the management of the training vessel was effective in the purpose of familiarizing the cadets before carrying out marine practices on commercial vessels. However, there needs to be consistency in the duration of the training implementation. Guidelines for the implementation of training on training ships have not been implemented optimally. There needs to be assignments for lecturers/instructors on board. Programs and training on training ships have not been fully accommodated in the education and training curriculum

Keywords : Training ships, effectiveness, training

Abstrak. Fungsi kapal latih adalah sebagai tempat pendidikan, pelatihan, peragaan dan simulasi di laut dan sebagai laboratorium untuk kegiatan proses pendidikan dan pengajaran yang membentuk dan mengembangkan serta meningkatkan *knowledge, skill, understanding* dan *experience* serta *attitude* dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran niaga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan kapal latih dengan studi kasus KL MH Thamrin apakah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya, dan juga untuk mengetahui apakah pengelolaan kapal latih sudah optimal untuk pengembangan SDM dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan, serta untuk mengetahui aspek legal dan aturan yang mendukung terlaksananya kegiatan kapal latih sebagai media pembelajaran praktek untuk taruna dan taruni. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keefektifan pengelolaan Kapal latih berjalan efektif dalam tujuan familiarisasi para taruna dan tarunisebelum melaksanakan praktek laut di atas kapal niaga. Akan tetapi perlu adanya konsistensi durasi waktu pelaksanaan pelatihan. Pedoman pelaksanaan pelatihan di Kapal latih belum diimplemenasikan secara maksimal. Perlu adanya penugasan para dosen/instruktur. Program dan pelatihan di kapal latih belum sepenuhnya diakomodir dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci : kapal latih, efektivitas, pelatihan

*Corresponding author's e-mail : muchlisimanullaharief@gmail.com

1. Pendahuluan

Mengelola kapal latih diperlukan pedoman, petunjuk teknis dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat menjadi pedoman semua UPT serta mengakomodir dalam kurikulum agar dalam mengelola kapal latih sebagai kapal negara special purpose dapat tercapai. Kegiatan pelatihan taruna dan tarunidan masyarakat, pengoperasian kapal latih untuk kegiatan lainnya diluar pelatihan taruna/i, pengelolaan awak kapal latih, maintenance kapal latih serta kebutuhan operasional termasuk di dalamnya adalah logistik, bahan bakar dan spare part pengelolaan kapal latih.

Sampai dengan saat ini, pelaksanaan pembelajaran tarunai UPT laut di bawah PPSDM Perhubungan Laut hanya mengacu kepada kurikulum yang bersumber dari Peraturan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK. 07/BPSDMP-2016 tentang kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Namun kurikulum tersebut belum mengakomodir kegiatan para taruna dan taruni untuk melaksanakan pelatihan di kapal latih sehingga tidak ada kewajiban bagi UPT untuk mengirimkan taruna dan taruninya melaksanakan pelatihan di kapal tersebut. Kapal latih juga harus di awaki oleh para SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengoperasikan kapal.

Hasil penelitian Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal latih BPSDMP guna peningkatan kualitas pendidikan pelaut Indonesia menyampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia perhubungan yang berbasis nilai keadilan bermartabat, dalam pengembangan sekolah pelayaran untuk meningkatkan mutu pendidikan mempunyai peran sangat vital. Sumber daya manusia akan menjadi daya dukung utama menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan di negara, oleh karena itu potensi sumber daya pendidikan untuk membangun pendidikan bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga membangun bangsa yang berbudaya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BSDMP) tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan saat taruna didik lulus ujian saja, namun juga membangun peradaban budaya manusia perhubungan yang bermartabat. Selanjutnya, pembuatan kebijakan tentang pengelolaan kapal latih bagi sekolah/akademi pelayaran merupakan kajian penting sebagai faktor peningkatan kualitas/mutu pendidikan bagi taruna pelayaran itu sendiri. (Wahyu Wibisono, 2020)

Kurikulum pendidikan kepelautan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Bab IV Pasal 10 yaitu kurikulum pendidikan kepelautan disusun dengan memperhatikan : 1) Aspek keselamatan 2) Tingkat kemampuan dan kecakapan pelaut, sesuai standar kompetensi yang ditetapkan dan 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen di bidang pelayaran.

Selanjutnya kurikulum pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran. Kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran, merupakan pedoman dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran bagi lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi laut.

K. Muszyńska, (2017) dalam artikel ilmiahnya *Management Systems of Gdynia Maritime University's the Training Ships Operation* menyatakan fungsi utama dari kapal latih adalah menyediakan program atau aturan atau pedoman untuk pelatihan para pelaut sesuai dengan kondisi di kapal pada saat *drill* atau pelatihan lainnya untuk awak kapal, termasuk navigasi pelayaran, manuver kapal dan memelihara sistem-sistem di kapal. Selanjutnya, dinyatakan bahwa kompleksitas operasional kapal latih membutuhkan implementasi dari pelaksanaan aturan yang tertuang dalam dokumen dan panduan serta juknis atau SOP pengelolaan kapal latih.

Fokus dari penelitian ini adalah keefektifan dan pengelolaan program kapal latih di lingkungan BPSDMP, belum optimal sebagai kapal latih dan kapal negara fungsi khusus (*special purpose*) serta program dan pelatihan di kapal latih sebagai pedoman atau kurikulum diklat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan kapal latih MH Thamrin berjalan efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya serta sesuai dengan kebutuhan pelatihan untuk taruna dan taruni. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan kapal latih sudah optimal oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan termasuk untuk mengetahui aspek legal dan aturan yang mendukung terlaksananya kegiatan kapal latih sebagai media pembelajaran praktek untuk taruna dan taruni, yang meliputi 1) Aspek legal yang terkait kapal latih sebagai kapal untuk pelatihan bagi taruna dan taruni atau kapal latih sebagai kapal dengan fungsi khusus (*special purpose*) selain untuk pelatihan 2) Pedoman pengelolaan terpadu kapal latih sebagai media pelatihan praktek untuk taruna dan taruni dan 3) Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang mengakomodir kapal latih sebagai media pelatihan untuk taruna dan taruni.

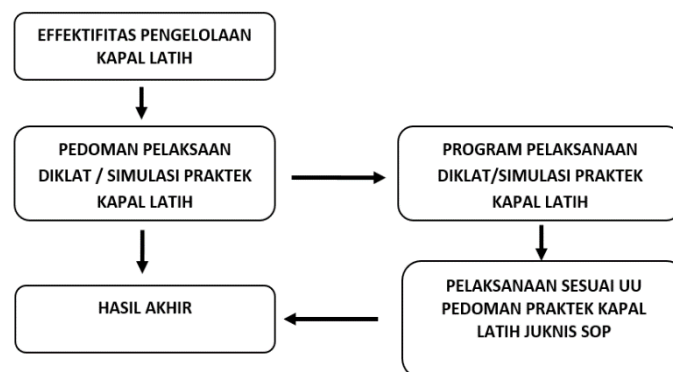
2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena ada suatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi mengenai efektifitas pengelolaan kapal latih di lingkungan BPSDMP (studi kasus kapal latih MH Thamrin). Data diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) sejumlah 36 orang, diantaranya awak kapal latih MH Thamrin 6 orang dan taruna /i STIP sejumlah 30 orang.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi serta focus group discussion. Sampel dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Informan awak kapal latih MH Thamrin dan taruna /i STIP 2) Narasumber yaitu Wakil Ketua STIP dan para Kepala Jurusan serta Kepala Unit Kapal latih. Selanjutnya, dilaksanakan Focus Group

Discussion dilakukan dengan tujuan untuk menambah pemahaman tentang pengelolaan kapal latih MH Thamrin. Focus Group Discussion dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pengelolaan tersebut. Peserta FGD penelitian ini berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) narasumber, dan 5 (lima) peneliti.

Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis kurikulum yang bersumber dari Peraturan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK. 07/BPSDMP-2016 tentang kurikulum program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran serta Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kegiatan pelatihan di kapal latih MH Thamrin. Kerangka Konseptual penelitian adalah sebagai berikut :



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar-1 Kerangka Konseptual Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan kapal latih MH Thamrin berjalan efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya serta sesuai dengan kebutuhan pelatihan untuk taruna dan taruni. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan kapal latih sudah optimal oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan termasuk untuk mengetahui aspek legal dan aturan yang mendukung terlaksananya kegiatan kapal latih sebagai media pembelajaran praktek untuk taruna dan taruni, yang meliputi 1) Aspek legal yang terkait kapal latih sebagai kapal untuk pelatihan bagi taruna dan taruni atau kapal latih sebagai kapal dengan fungsi khusus (*special purpose*) selain untuk pelatihan 2) Pedoman pengelolaan terpadu kapal latih sebagai media pelatihan praktek untuk taruna dan taruni dan 3) Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang mengakomodir kapal latih sebagai media pelatihan untuk taruna dan taruni.

Hasil dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*interview in depth*) secara langsung kepada informan sejumlah 30 orang taruna dan taruni terdiri dari 10 orang dari Jurusan Nautika, 10 orang dari Jurusan Teknik dan 10 orang dari Jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Persentase jumlah informan yaitu 30 persen dari kapasitas taruna dan

tarunidan Awak kapal sebanyak 6 orang yang terdiri dari : Nakhoda, Kepala Kamar Mesin beserta Perwira Dek dan Perwira Mesin, serta narasumber dari Pimpinan STIP (Waket 1, Para Kajur dan Kanit Kapal latih). Kemudian peneliti juga menggunakan teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP).

Wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber disimpulkan bahwa pada prinsipnya penggunaan kapal latih sebagai sarana praktek di kapal untuk pengenalan bagi Taruna dan taruni semester 3 dan persiapan bagi taruna /i semester 7 yang akan mengikuti praktek laut belum efektif dan optimal karena keterbatasan waktu dan jumlah taruna dan taruni yang akan melaksanakan praktek di kapal latih.

Dalam rangka kualitas pembelajaran praktek di kapal latih, diperlukan pedoman pelaksanaan dan diberlakukan untuk semua kapal latih yang dimiliki oleh BPSDMP. Selain itu, untuk peningkatan promosi dan pengabdian kepada masyarakat, peran kapal latih MH Thamrin dapat dijadikan sebagai sarana praktek bagi Sekolah Pelayaran di wilayah JABODETABEK melalui kerjasama yang professional dan saling menguntungkan.

Wawancara kepada awak kapal latih MH Thamrin ditemukan bahwa masih terdapat awak kapal yang bertugas melaksanakan *double job* yaitu tugas utama sebagai operator kapal dan juga memberikan pelatihan kepada taruna dan taruni di atas kapal latih. Hal ini apabila tidak ditetapkan dengan pengaturan yang baik maka jadwal kerja, waktu istirahat dan tugas sebagai Instruktur dikhawatirkan akan menjadi beban kerja yang berlebihan (*overload*), sehingga menyebabkan kelelahan (*fatigue*). Faktor lain yang menjadi pertimbangan peran awak kapal latih dalam melaksanakan pelatihan adalah kompetensi awak kapal. Kompetensi sebagai instruktur tentunya harus ditunjukkan dengan sertifikasi. Pelaksanaan praktek kapal latih belum sepenuhnya didukung oleh pedoman pelaksanaan yang komprehensif untuk kegiatan pelatihan yang mencakup aspek peningkatan kompetensi dan keilmuan peserta, aspek keselamatan dan keamanan.

Wawancara kepada taruna dan taruni peserta pelatihan di atas kapal latih MH Thamrin disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek kapal latih belum sepenuhnya didukung oleh pedoman pelaksanaan yang komprehensif untuk kegiatan pelatihan yang mencakup aspek peningkatan kompetensi dan keilmuan peserta, aspek keselamatan dan keamanan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan jawaban yang berbeda-beda diantaranya durasi pelatihan dan jenis pelatihan yang diikuti, meskipun secara umum mendapatkan pengalaman yang sama dalam mendapatkan praktek navigasi, keselamatan pelayaran, keselamatan kerja, alat-alat keselamatan, dan permesinan kapal

Tingkat keefektifan pengelolaan kapal latih di lingkungan BPSDMP, khususnya kapal latih MH Thamrin yang digunakan untuk praktek taruna dan taruni STIP Jakarta, saat ini peruntukannya masih sebagai sarana praktek di kapal untuk pengenalan bagi taruna dan taruni semester 3 dan persiapan bagi taruna dan taruni semester 7 yang akan mengikuti praktek laut. Secara keseluruhan kapal latih MH Thamrin efektif digunakan sebagai sarana pengenalan kapal

bagi taruna dan taruni dengan presentase 73 % namun 27 % durasi pelatihan menyatakan durasi waktu kurang.

Pengelolaan program kapal latih di lingkungan BPSDMP sebagai kapal latih dan kapal negara fungsi khusus (*Special Purpose*). Dalam rangka kualitas pembelajaran di kapal latih, diperlukan pedoman pelaksanaan praktek dan diberlakukan untuk semua kapal latih yang dimiliki oleh BPSDMP.

Pedoman dan kurikulum diklat program pelatihan di kapal latih. Program dan pelatihan di kapal latih telah diakomodir dalam suatu pedoman dan kurikulum diklat, namun sesuai hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan praktek kapal latih belum sepenuhnya didukung oleh pedoman pelaksanaan yang komprehensif untuk kegiatan pelatihan di kapal latih yang mencakup aspek peningkatan kompetensi dan keilmuan peserta, aspek keselamatan dan keamanan.

4. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat keefektifan pengelolaan kapal latih di lingkungan BPSDMP, khususnya pada kapal latih MH Thamrin untuk mencapai tujuan pemanfaatan kapal latih dalam hal pengenalan dan peningkatan kompetensi keilmuan taruna dan taruni berjalan cukup efektif terutama dalam tujuan pengenalan para taruna dan taruni sebelum mereka melaksanakan praktek laut di atas kapal niaga. Akan tetapi perlu adanya konsistensi durasi waktu pelaksanaan pelatihan yang menyesuaikan dengan program pelatihan yang akan dilaksanakan selama pelatihan di kapal latih. Durasi waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari belum menunjukkan tingkat kepuasan penerimaan materi selama di kapal latih.

Pedoman pelaksanaan pelatihan di kapal latih yang diberlakukan untuk semua kapal latih di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, belum diimplementasikan secara maksimal karena belum diterbitkannya pedoman pelaksanaan kapal latih. Hal tersebut menyebabkan program dan pola pengelolaan kapal latih berpotensi berbeda di setiap sekolah pelayaran yang memiliki kapal latih.

Peran awak kapal latih serta dosen dan instruktur sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan bagi para taruna dan taruni yang sedang belajar di kapal latih. Untuk itu perlu adanya penempatan para awak kapal sebagaimana kondisi sesungguhnya di kapal, yaitu sebagai operator kapal serta penugasan terpisah para dosen dan instruktur yang berkompeten untuk melatih praktek para taruna dan taruni. Program dan pelatihan di kapal latih belum sepenuhnya diakomodir dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan sehingga pelaksanaan praktek kapal latih masih bersifat pelatihan pendukung. Kurikulum dan Pedoman pelatihan kapal latih merupakan salah satu standar yang nantinya menjadi rujukan untuk pelatihan di setiap sekolah pelayaran yang memiliki kapal latih yang bernaung di BPSDMP.

5. Daftar Pustaka

Hasan Baharun, dkk. 2017. Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik. Probolinggo.

K. Muszyńska, 2017. *Management Systems of Gdynia Maritime University's the Training Ships Operation*. Gdynia, Poland

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut.

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.

WS Utomo, 2020. *Desertasi S3 Konstruksi Hukum Pengelolaan Kapal latih Bpsdmp Guna Peningkatan Kualitas Pendidikan Pelaut Indonesia*.